

Politik Lingkungan: Sebuah Pergulatan Tanpa Henti

Giri Ahmad Taufik

Jumlah Halaman :

273 Halaman

Penerbit :

Equinox Publishing Jakarta-Singapore

Penulis :

Hariadi Kartodiharjo dan Hira Jhamtani (ed), dkk;



Keterbatasan sumberdaya ekonomi merupakan sebuah persoalan yang mendasar dari perjalanan peradaban manusia. Segala daya, upaya, dan pikiran manusia digunakan dan dicurahkan untuk mengatasi dan mengelola keterbatasan ekonomi yang ada. Keterbatasan pada akhirnya menimbulkan kelangkaan dan kelangkaan terhadap sumberdaya ekonomi, merupakan awal penderitaan manusia.

Menghadapi persoalan keterbatasan ini, manusia selalu dihadapkan pada posisi dilematis, mengenai keputusan apa yang harus diambil dalam mengelola keterbatasan yang ada agar dapat menyejahterakan manusia. Beragam teori dan ideologi telah dikembangkan guna mengatur dan mengambil keputusan mengenai pilihan-pilihan dalam mengelola sumberdaya ekonomi mulai dari tawaran pengelolaan ala

kapitalistik dengan kredo mekanisme pasar sebagai kelembagaan terbaik di dalam mengelola keterbatasan ekonomi secara efisien, sampai dengan tawaran komunistik yang memonopoli penguasaan sumberdaya ekonomi sebagai cara untuk mencapai keadilan sosial. Namun seiring dengan berkembangnya zaman, tantangan baru pun datang. Tantangan tersebut adalah kelestarian lingkungan hidup sebagai variabel yang harus dipertimbangkan dalam mengelola keterbatasan ekonomi terutama yang berbasis pada sumberdaya alam.

Pada konteks inilah buku *Politik Lingkungan dan Kekuasaan di Indonesia*, yang disunting oleh Hariadi Kartodihardjo dan Hira Jhamtani, dihadirkan sebagai sumbangsih wacana pengembangan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan.

Alienasi dan Analisis Aktor dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup

Buku ini secara spesifik menggambarkan bagaimana kelembagaan dan proses pengelolaan sumberdaya ekonomi, khususnya yang berbasis sumberdaya alam dikelola di Indonesia. Relasi kekuasaan dalam menentukan pilihan-pilihan pengelolaan sumberdaya alam tergambar secara jelas dan detail dalam buku ini. Penggunaan konsep-konsep seperti alienasi, dikotomi dan analisis aktor sebagai alat analisis, dapat secara tajam membongkar relasi kekuasaan yang terjadi dan implikasinya terhadap lingkungan hidup.

Konsep alienasi misalnya, dapat menguraikan bagaimana relasi kekuasaan yang tidak mengikutsertakan masyarakat lokal dan pendekatan yang sifatnya sektoral dalam pengelolaan sumberdaya alam, telah menghancurkan modal sosial masyarakat lokal. Sehingga fakta yang terjadi adalah marjinalisasi masyarakat lokal terhadap akses sumberdaya alam yang ujung-ujungnya adalah kemiskinan dan ironisnya justru terjadi di daerah-daerah yang kaya sumberdaya alam (hal.4). Satu contoh yang diangkat dalam buku ini, ialah kisah Sarikun petani asas Wonomukti, yang mengeluhkan larangan pemerintah untuk melakukan eksploitasi terhadap hasil produksi hutan, meski petani macam dirinya memiliki andil dalam penanaman hutan tersebut. Model marjinalisasi ala Sarikun, memberikan sebuah gambaran kontras sebuah ketidakadilan dalam proses pengelolaan sumberdaya alam. Sarikun yang mungkin hanya memiliki ambisi sekedar untuk menyambung hidup, dihambat

sedemikian rupa oleh berbagai larangan. Hal ini berbeda dengan nasib dari perusahaan-perusahaan besar pemegang HPH, perusahaan-perusahaan ini mampu mengakses sumberdaya alam secara massif dan dalam skala yang tidak terbayangkan bagi seorang petani sederhana seperti Sarikun (hal.13).

Satu alat analisis lainnya ialah analisis aktor. Alat analisis seperti ini adalah hal yang lazim dalam kajian-kajian kebijakan, berfungsi untuk memetakan pelaku-pelaku dan relasinya satu sama lain dalam memproduksi sebuah kebijakan. Dalam konteks sumberdaya alam di Indonesia, buku ini memotret setidaknya terdapat tiga kepentingan berbeda dalam memproduksi kebijakan pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan. *Pertama* ialah kepentingan publik, *kedua* adalah kepentingan individu. Dalam batas tertentu, kedua kepentingan tersebut sering saling bertentangan. Namun di luar dua kepentingan tersebut, buku ini juga memotret kepentingan *ketiga* yakni pihak asing seperti *multinational corporations*, lembaga-lembaga keuangan multilateral seperti IMF, Bank Dunia dan sebagainya. Kelompok ketiga ini menjadi sangat berperan dalam menentukan kebijakan pengelolaan sumberdaya pasca lengsernya Soeharto.

Dengan menerapkan mekanisme *policy-based lending* dan bantuan keuangan dalam bentuk hibah-hibah, lembaga-lembaga keuangan internasional menentukan pengelolaan sumberdaya alam di Indonesia. Buku ini mencatat salah satu kebijakan yang cukup fenomenal ialah program WATSAL (*water resource sector adjustment loan*), yang didorong oleh Bank Dunia, yang melahirkan UU Nomor 7 Tahun 2003 tentang Sumber Daya Air yang menitikberatkan pengelolaan air pada komersialisasi daripada konservasi.

Bencana Ekologis dan Krisis Modal Sosial

Titik tekan pada kepentingan komersialisasi sumberdaya alam dibanding menjaga fungsi kelestarian lingkungan hidup, bukan semata-mata monopoli pada satu masa tertentu. Buku ini merekam bagaimana dari masa ke masa, proses tersebut telah dilakukan. Berawal dari masa kolonial di mana pengelolaan sumberdaya alam hanya diabdikan bagi kepentingan penjajah. Pada masa Soekarno dengan melakukan nasionalisasi perusahaan-perusahaan Belanda yang bergerak di dalam pengelolaan sumberdaya alam yang hanya ditujukan untuk menjamin

stabilitas politik (hal. 21).

Fenomena tentaranisasi dan kolaborasinya dengan pengusaha dan elit birokrasi dalam pengelolaan sumberdaya alam mewarnai kebijakan-kebijakan pengelolaan SDA pada masa Orde Baru Soeharto. Pada masa reformasi, lembaga-lembaga keuangan internasional menunjukkan giginya di dalam proses pengambilan kebijakan. Tercekam pula bahwa setiap kebijakan yang diluncurkan tidak didasarkan pada pertimbangan kearifan dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup. Justru sebaliknya, hanya semata-mata bermotif politik ataupun ekonomi yang ujungnya hanya menguntungkan kalangan tertentu.

Pengabaian kelestarian lingkungan hidup dan kepentingan masyarakat lokal adalah hal yang lazim. Sebagai contoh ialah megaprojek lahan gambut sejuta hektar yang gagal karena tidak melalui proses pengkajian ilmiah yang mendalam. Proyek ini telah meninggalkan eksek besar bagi lingkungan hidup dan lingkungan sosial masyarakat lokal. Dari sisi lingkungan hidup, proyek ini telah menghilangkan beberapa jenis tumbuhan langka dan dilindungi, seperti ramin, jelutung dan lain sebagainya dan termasuk juga kebakaran pada lahan eks proyek ini telah menyumbang asap yang besar ketika terjadi kebakaran hutan pada 1997. Pada masyarakat lokal, dampak ekonominya menjadi sangat besar dengan turunnya kualitas air Sungai Barito dan Kapuas sehingga menimbulkan kerugian bagi penangkap ikan tradisional (hal. 53).

Orientasi semata-mata pada kepentingan ekonomi dan politik kelompok tertentu, secara akumulatif telah menyebabkan perusakan lingkungan baik lingkungan hidup maupun sosial. Buku ini menggambarkan bagaimana krisis lingkungan hidup telah menimbulkan bencana ekologis dan menciptakan krisis modal sosial di dalam masyarakat.

Bencana ekologi dan penurunan kualitas lingkungan hidup di Indonesia merupakan akibat langsung dari perusakan lingkungan. Untuk mendukung argumentasi yang dikemukakan, buku ini menampilkan data-data kerusakan lingkungan, seperti mengenai laju penggundulan hutan, kebakaran hutan, ancaman krisis air bersih yang menyeruak di kota-kota besar di Pulau Jawa, dan berbagai kasus-kasus bencana yang menerjang di Daerah Aliran Sungai seperti dalam kasus DAS Bohorok di Sumatera Utara pada 2003 (hal. 106). Data-data tersebut ditata secara apik dengan menampilkan tabel-tabel dan angka-angka mengenai

kerusakan lingkungan yang terjadi di Indonesia saat ini.

Dari sisi lingkungan sosial, banyak kasus perusakan lingkungan pada akhirnya menyebabkan krisis modal sosial, yang berujung pada konflik antar masyarakat. Konflik dan bagaimana krisis modal sosial ini terjadi ditampilkan melalui box-box ilustrasi yang berisi cerita-cerita yang memiliki nuansa *human interest*, kehadiran box-box ini mampu mengaktualisasikan persoalan ke dalam sebuah konteks yang nyata dan terasa hadir bagi para pembaca.

Transformasi dalam Pengelolaan Sumberdaya Alam

Titik penting dari buku ini ialah tawaran mengenai transformasi kebijakan pengelolaan sumberdaya alam. Tawaran tersebut berisi tentang proses pengambilan kebijakan yang lebih partisipatif dengan melibatkan masyarakat secara luas khususnya kelompok-kelompok masyarakat lokal dalam pengelolaan lingkungan hidup. Kedua penulis buku ini menawarkan tiga konsep prakarsa kebijakan pengelolaan sumberdaya alam yang diambil dengan menganalisis *best practices* penyelenggaraan pengelolaan lingkungan yang mengikutsertakan masyarakat lokal.

Tiga macam prakarsa tersebut; *pertama* prakarsa asli atau *endogen* yaitu prakarsa yang menggunakan konsep, kelembagaan dan mekanisme masyarakat setempat dalam melakukan pengelolaan sumberdaya alam, seperti dalam fenomena subak di Bali; *kedua* terkait dengan transformasi pola pemanfaatan sumberdaya alam dari bersifat eksploitatif dan merusak menjadi pola pengelolaan yang mengarah pada kelestarian ekologi dan manfaat; dan *ketiga* ialah proses partisipatif dalam kebijakan pengelolaan sumberdaya alam, di mana negara memperhatikan setiap kepentingan *stakeholders* dalam mengambil sebuah kebijakan (hal. 220-221).

Secara konseptual, tawaran di atas dirasa dapat diterima sebagai solusi di dalam manajemen pengelolaan sumberdaya alam di Indonesia. Namun demikian, layaknya sebuah gagasan baru diperlukan energi dan aktor dalam mendorong transformasi kebijakan yang ada ke arah gagasan baru tersebut. Hal inilah yang kurang dielaborasi di dalam buku ini, beberapa *best practices* yang dijadikan rujukan model transformasi dalam pengelolaan sumberdaya lingkungan hidup hanya berhenti pada pemaparan konsep. Tapi tidak menyentuh proses-proses politik yang telah dilakukan pada kasus-kasus tersebut. Sehingga tidak tercermin

bagaimana relasi antara aktor dan tarik-menarik kepentingan dalam transformasi kebijakan terjadi. Padahal di dalam bab-bab sebelumnya, relasi aktor di dalam kesejarahan pengelolaan sumberdaya alam telah dipaparkan secara baik.

Terlepas dari itu semua di atas, satu hal bahwa persoalan transformasi pengelolaan sumberdaya lingkungan di Indonesia tidak hanya terletak pada ketiadaan konsep alternatif pengelolaan, namun juga persoalan keinginan dari para pemangku kepentingan (*stakeholders*) untuk melakukan transformasi tersebut. Jika kemudian buku ini mengidentifikasi aktor pendorong transformasi adalah masyarakat lokal. Persoalannya terletak pada sebesar apa energi yang dimiliki oleh masyarakat lokal atau adat ini dapat “mengalahkan” keserakahan pemodal-pemodal besar dan elit birokrasi korup dalam mengeksploitasi sumberdaya alam?